

**Kemitraan Global untuk Transparansi Pemerintah:  
Rencana Aksi *Open Government* Indonesia**

**Griselda Isaura**

Institut Komunikasi dan Bisnis London School of Public Relations

Jl. K.H. Mas Mansyur No. Kav. 35, Jakarta 10220 - Indonesia

Email Korespondensi: [seldaisaura@gmail.com](mailto:seldaisaura@gmail.com)

**Abstract** - The presence of the democracy concept that has now begun to be accepted by many countries in the world and also the concept of good governance which is now set as an international agenda, and the development of technological innovation also can not be detained anymore, so much information is coming into civil society, which makes civil society to be more critical in assessing government performance and demanding for a more open and transparent government. In 2011, at the United Nations General Assembly Meeting, Indonesia along with 8 other countries agreed to initiate a movement to encourage an open government called Open Government Partnership. In Indonesia this global movement is called Open Government Indonesia. This movement will initiate a national action plan as a commitment of Indonesia to become a country that suits the criteria of good governance and to answer the public challenge about openness. Using descriptive studies, the research results will show a partnership in governance as reflected by three processes of action plans, which are formulation, implementation, and evaluation.

**Keywords:** Good governance, Open government, Action plan

**Abstrak** - Kehadiran konsep demokrasi yang sudah mulai diterima oleh banyak negara di dunia dan juga konsep *good governance* atau pemerintahan yang baik yang saat ini sudah menjadi agenda internasional, dan perkembangan dari inovasi teknologi juga sudah tidak dapat ditahan lagi, sehingga banyak informasi yang masuk ke dalam masyarakat, menyebabkan masyarakat semakin kritis dalam menilai kinerja pemerintah dan menuntut untuk pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. Indonesia bersama delapan negara pencetus lainnya dalam United Nations General Assembly tahun 2011 sepakat untuk menginisiasi sebuah gerakan untuk mendorong pemerintahan yang terbuka yang dinamakan Open Government Partnership. Di Indonesia gerakan global ini dinamakan *Open Government* Indonesia. Gerakan ini menginisiasi sebuah rencana aksi nasional sebagai sebuah komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan sebagai jawaban untuk menjawab tantangan masyarakat tentang keterbukaan. Dengan menggunakan studi deskriptif, hasil penelitian menunjukkan kemitraan yang ada dalam tata kelola pemerintahan yang tercermin dalam tiga proses perumusan rencana aksi, yaitu formulasi aksi, implementasi aksi, dan evaluasi aksi.

**Kata kunci:** Pemerintahan yang baik, Pemerintahan yang terbuka, Rencana aksi

**Pendahuluan**

Agenda pemerintahan yang baik atau *good governance* kini telah menjadi suatu agenda internasional, terutama setelah diterimanya gagasan demokrasi di banyak negara. *United Nations Development Programmes* (United Nations, 2007: 7) menggambarkan sembilan karakteristik yang harus ada pada pemerintahan yang baik yaitu

partisipasi, memiliki supremasi hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus, adil dalam kesetaraan, efektif dan efisien, memiliki akuntabilitas, dan memiliki visi yang strategis. Berorientasi pada konsensus sebagai salah satu karakteristik berarti mengutamakan musyawarah mufakat, keputusan bersama di atas kepentingan pribadi.

Melibatkan rakyat atau adanya perwakilan rakyat di dalam pemerintahan merupakan salah satu ciri utama di dalam prinsip demokrasi. Ungkapan terkenal mengenai demokrasi dikatakan Abraham Lincoln (Soleh, n.d.), demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Demokrasi terus berkembang dari sekedar pengertian lama tentang pemerintahan di suatu negara dari rakyat untuk rakyat menuju demokrasi yang lebih modern yang melibatkan seluruh masyarakat tidak hanya di satu negara, namun juga melibatkan seluruh masyarakat secara global. Selanjutnya, isu demokrasi terus berkembang menuju isu keterbukaan yang juga diinginkan oleh masyarakat.

Demokrasi dan transparansi merupakan pilar dalam perwujudan untuk pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemerintahan yang baik, transparansi merupakan isu serius yang didambakan oleh masyarakat untuk pemerintahan yang lebih transparan dan terbuka. Dalam bukunya, Sumarto (2003: 1-2) mengartikan pemerintahan atau *governance* merupakan sebuah mekanisme, sebuah tata cara pemerintahan dalam mengatur urusan yang menyangkut masyarakat luas, dalam pengertian ini juga mengatakan bahwa di dalam pemerintahan, pemerintah bukan satu-satunya aktor utama yang menentukan, tapi dibutuhkan juga keterlibatan di luar negara selain pemerintah.

Pencapaian pemerintahan yang baik dan hadirnya konsep pemerintahan dapat dikatakan membawa tuntutan yang besar bagi aktor di luar pemerintah yaitu masyarakat untuk berperan aktif, salah satunya berperan dalam memonitor kegiatan dan akuntabilitas dari pemerintah itu sendiri. Dimulai dari demokrasi hingga transparansi yang pada akhirnya memunculkan kontrol masyarakat yaitu adanya organisasi masyarakat sipil sebagai perwujudan dari konsep pemerintahan.

Konsep pemerintahan yang diterapkan dalam tingkat internasional dan hubungannya dengan transparansi yang juga menjadi isu global terlihat dengan hadirnya organisasi *non*-pemerintah bersifat internasional.

*Transparency International* merupakan salah satu bentuk dari kehadiran organisasi nonpemerintah dengan cakupan internasional yang bekerja bersama-sama dengan pemerintah dan institusi lain, salah

satunya yaitu dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), bekerja bersama untuk mengawasi implementasi dari kebijakan PBB yang ada di negara-negara terkait untuk penanggulangan korupsi. Kerjasama antara TI, UNCAC, dan pemerintah merupakan contoh konkret dari konsep *international governance*, yang juga mengedepankan peranan aktif masyarakat lokal maupun internasional.

Korupsi merupakan masalah utama yang sering muncul jika membahas mengenai permasalahan transparansi dan merupakan masalah serius yang dihadapi tidak hanya oleh negara-negara miskin, melainkan juga negara berkembang dan negara maju, korupsi juga menjadi penghalang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi sekarang ini dapat diartikan sebagai sebuah tindak kriminal dan perbuatan yang dapat menghancurkan (UN, 2015). Korupsi juga merupakan hal yang serius yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, *Transparency International* mengeluarkan *Corruption Perception Index* atau Indeks Persepsi Korupsi. *Corruption Perception Index* (CPI) merupakan indeks yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dan didistribusikan melalui agen-agenya yang ada di berbagai negara.

Indeks korupsi ini merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi (TII, 2016), indeks ini juga telah digunakan oleh banyak negara sebagai acuan tentang situasi korupsi dalam negeri dibandingkan dengan negara lain.

Selain sebagai indeks yang mengukur tingkat korupsi di suatu negara, indeks ini juga merupakan sebuah pengukuran yang dilakukan dari berbagai aspek dan indikator, seperti tingkat pelayanan publik, keterlibatan masyarakat dan juga termasuk keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Isu transparansi dan isu korupsi yang telah berkembang menjadi isu global dan menjadi perhatian masyarakat dunia telah menjadi pendorong untuk kegiatan global menuju pemerintahan yang lebih baik dan terbuka.

*Open Government Partnership* (OGP) sebagai sebuah gerakan global untuk pemerintahan yang lebih transparan, efektif,

dan akuntabel, dengan lembaga negara yang memberdayakan warga negara dan responsif terhadap aspirasi mereka (OGP, n.d.)

Pada peresmian *Open Government Partnership*, delapan deklarasi yang dinamakan, “Deklarasi Pemerintah Terbuka”, dan dalam deklarasi itu, delapan negara tersebut mengumumkan rencana aksi dari masing-masing negara. Indonesia juga merupakan salah satu negara anggota dari OGP tersebut. Di Indonesia, penerapan gerakan global ini dinamakan *Open Government* Indonesia atau disingkat OGI.

OGI merupakan bagian dari gerakan global OGP yang bertujuan untuk mendorong pemerintah yang lebih transparan dan masyarakat yang lebih pro-aktif untuk mencapai *good governance* atau pemerintahan yang baik. Tiga pilar utama dalam OGI adalah transparansi, partisipasi, dan inovasi.

Rencana aksi merupakan program utama baik itu di OGP maupun OGI. Rencana aksi atau disingkat RENAKSI, di OGI adalah sebuah program tahunan yang dijalankan setiap dua tahun sekali dan merupakan kumpulan program kerja yang disusun oleh kementerian dan lembaga pemerintahan, dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diutamakan (OGI, n.d.).

RENAKSI adalah sebuah perwujudan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, terutama yang diwakilkan oleh lembaga non-pemerintah.

Terbentuknya kerjasama dan berbagai macam organisasi masyarakat sipil yang mengedepankan pemberantasan korupsi, keterbukaan, dan transparansi pemerintah, menunjukkan bahwa isu tersebut bukan hanya menjadi permasalahan atau keinginan masyarakat di suatu negara, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga menjadi keinginan dari masyarakat dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama tersebut adalah perwujudan dari *global governance*, yang mengedepankan kerjasama dari berbagai pihak selain pemerintah.

Fakta bahwa isu transparansi pemerintahan telah menjadi isu global dan posisi Indonesia dalam IPK yang masih jauh dari rerata global, indeks korupsi sebagai bukti bahwa transparansi yang menjadi isu utama dan korupsi sebagai akar masalah dari keinginan masyarakat untuk lebih terbuka, sampai teretus adanya usaha kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan

nonpemerintah, termasuk masyarakat sipil dan organisasi yang terbentuk menjadi sebuah kemitraan.

### Kerangka Teori

Di setiap tata kelola pemerintah memiliki sisi yang positif dan juga sisi yang negatif. Sisi baiknya salah satunya adalah ketika pemerintahan itu bisa memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pemerintah atau wakil rakyat dalam konteks demokrasi yang berujung pada kesejahteraan dan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Di lain sisi, yaitu sisi buruknya salah satunya adalah ketika sistem tata kelola tidak mampu menjawab harapan masyarakat dan bergeser menuju arah yang berlawanan.

Korupsi merupakan salah satu akibat dari sistem tata kelola yang tertutup, hingga hal ini bisa terjadi. Tertutup dan korupsi dapat dikatakan berarti tidak terbuka dalam banyak hal, seperti dalam hal pelayanan publik yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi merupakan sebuah ancaman, bukan hanya sebagai ancaman nasional melainkan ancaman global bagi setiap negara.

Gerakan kemitraan global tidak serta-merta muncul tanpa adanya alasan, dan salah satu alasan itu adalah korupsi. Negara, organisasi pemerintah, organisasi nonpemerintah, sampai masyarakat sipil bersama-sama bekerja untuk menghadapi ancaman bersama ini. *Open Government Partnership* hadir sebagai gerakan global tersebut yang mempunyai tujuan untuk memfasilitasi isu-isu seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, korupsi, dan partisipasi.

*Open Government Partnership* juga hadir, didasari dengan adanya modalitas, salah satunya dengan adanya standar global yaitu UNCAC dan beberapa gerakan di negara-negara untuk memperjuangkan isu-isu tersebut, gerakan itu seperti Gerakan Anti Korupsi, dan lain-lain. Modalitas ini ada karena masih adanya harapan untuk pemerintah yang lebih baik. Gerakan global ini merupakan wujud dari prinsip liberalisme yang bersifat rasionalis, dan bahwa memungkinkan untuk diadakannya kerjasama yang dapat dimulai dari individu hingga tingkat internasional untuk mencapai sebuah tujuan.

Implementasi dari *Open Government Partnership* sendiri hadir di Indonesia dalam

bentuk *Open Government* Indonesia. OGI merupakan wadah yang dibentuk sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengatasi permasalahan transparansi dan keterbukaan yang diinginkan oleh masyarakat. Melalui rencana aksi yang disusun setiap dua tahun sekali dengan pendekatan pada perubahan sosial, dan terdiri dari tiga proses utama, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi, diharapkan dapat membawa gerakan keterbukaan bagi masyarakat dan reformasi di institusi pemerintah secara menyeluruh.

### 1. Liberalisme dalam Hubungan Internasional

Prinsip liberal mengakui bahwa individu mementingkan diri sendiri dan kompetitif sampai pada titik tertentu, liberal juga percaya bahwa individu dapat berbagi kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dalam sebuah kolaborasi dan aksi sosial, baik dalam cakupan nasional maupun internasional, yang menghasilkan manfaat lebih besar untuk semua orang (Jackson & Sorensen, 2013: 100).

Dapat dikatakan, konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari, namun dengan kehadiran liberalis hal tersebut dihindari dengan cara kerjasama yang saling menguntungkan dan keuntungan itu tidak hanya dirasakan untuk satu negara saja tapi juga mencapai batas internasional.

Liberalis yakin kemenangan atau kesuksesan dapat didapatkan dengan adanya kerjasama jangka panjang. Menurut Jackson dan Sorensen (2013: 101) liberal melihat negara sebagai entitas konstitusional, yang menetapkan dan memberlakukan aturan hukum yang menghormati hak-hak warga negara dalam hal kehidupan, kebebasan, dan properti. Negara konstitusional tersebut juga akan menghormati satu sama lain dan akan berurusan dengan satu sama lain sesuai dengan norma-norma toleransi. Pemikiran liberal sangat berhubungan dengan munculnya konstitusional negara modern.

Liberal berpendapat bahwa modernisasi adalah proses yang melibatkan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Proses modernisasi memperbesar ruang lingkup kerjasama di batas internasional. Kemajuan berarti kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Manusia memiliki alasan, dan ketika mereka menerapkan alasan tersebut untuk kerjasama internasional maka akan menghasilkan hasil akhir yang lebih baik.

### 2. Konsep Open Government

Menurut Lathrop dan Luma (dalam Gant & Lee, 2011) pemerintahan yang terbuka itu adalah:

*“Government that co-innovates with everyone, especially citizens, shares resources that were previously closely guarded; harnesses the power of mass collaboration, drives transparency throughout its operations, and behaves not as isolated department of jurisdiction but as something new, a truly integrated and networked organization”* (2011: 17)

Pemerintah yang terbuka adalah pemerintah yang bekerja dan berinovasi dengan semua orang, terutama masyarakat dan memanfaatkan kekuatan kolaborasi massa, mendorong transparansi di seluruh operasinya, dan berperilaku tidak sebagai departemen yang terisolasi oleh urusan yurisdiksi tetapi sebagai sesuatu yang baru, sebuah organisasi yang benar-benar terintegrasi.

Tujuan utama untuk inisiatif pemerintahan yang terbuka menurut Gant dan Lee (2011: 26) adalah untuk mempertimbangkan nilai yang baik bagi pemerintah dan warga negara. Di sisi lain sebagai pemberi layanan, pemerintah perlu untuk berbagi informasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan, efisiensi serta meningkatkan standar akuntabilitas. Di sisi permintaan, warga harus mengetahui informasi yang dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat pilihan terhadap informasi tentang keadaan bangsa mereka.

Inisiatif pemerintah terbuka menawarkan langkah maju yang menarik untuk membuat publik lebih mudah untuk mengetahui apa yang pemerintah lakukan, untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan sepenuhnya terlibat dalam kehidupan sipil dari komunitas mereka.

### 3. Inisiatif Open Government Partnership

Untuk pertama kalinya, *Open Government Partnership* dimunculkan atas inisiasi delapan negara yaitu Indonesia, Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Ide ini muncul ketika dilaksanakan *United Nations General*

*Assembly Meeting* dan diluncurkan pada 20 September 2011.

Dalam situs resminya *Open Government Partnership* (OGP), merupakan sebuah gerakan global yang bertujuan untuk menyediakan kerangka bagi pemangku kepentingan di negara anggota untuk mendorong terbangunnya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. OGP juga mendorong untuk pemanfaatan inovasi teknologi baru guna memudahkan proses penyelenggaraan pemerintah.

OGP bekerja dengan memiliki empat tujuan utama, yaitu mengamankan komitmen konkret dari pemerintah untuk mempromosikan transparansi, memberdayakan masyarakat, memerangi korupsi, dan pemanfaatan teknologi terkini. Dalam kerjasama ini, pemerintah tidak hanya didorong untuk transparan, akuntabel, dan inovatif, namun juga dapat berkolaborasi tidak hanya dengan pemangku kepentingan tapi dapat berkolaborasi dengan masyarakat sipil serta masyarakat luas. Dari dideklarasikan pada September 2011 hingga saat ini sudah hampir 70 negara yang ikut tergabung dalam OGP.

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretif yang bertujuan memahami makna dalam kehidupan bermasyarakat.

Teknik perolehan data primer didapat melalui observasi, sedangkan data sekunder diambildari studi pustaka, kajian dokumen, studi pustaka, serta berbagai data sekunder lainnya yang didapat dari internet.

### Hasil Penelitian

#### a. Rencana Aksi Open Government

Instrumen Rencana Aksi (RENAKSI), merupakan sebuah instrumen utama untuk memastikan kesinambungan ide, gagasan, dan kolaborasi dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia Sebagai sebuah instrument utama, Renaksi mencakup tiga langkah penting, yaitu formulasi aksi, implementasi aksi, dan evaluasi aksi.

Formulasi merupakan tahap terawal dalam rencana aksi, dimana formulasi merupakan proses penyusunan kebijakan yang nantinya akan menghasilkan aksi-aksi yang dipilih untuk mengatasi permasalahan keterbukaan dan dilaksanakan sebagai bentuk konkret dan keseriusan pemerintah Indonesia

untuk melakukan reformasi keterbukaan secara menyeluruh.

Untuk mendorong partisipasi publik, prinsip formulasi RENAKSI menggunakan prinsip penciptaan bersama secara terbuka dan dilakukan secara kolaborasi (OGI, n.d.). Kolaborasi yang disebutkan ini, diwujudkan dengan kolaborasi antara unsur pemerintah dan unsur publik sebagai tim ini. Dimana tujuh unsur pemerintah terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS, Kantor Staf Presiden, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Unsur publik terdiri dari 10 organisasi masyarakat sipil atau CSO, yaitu *Transparency International* Indonesia (TII), Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), *Indonesia Center for Environmental Law* (ICEL), *Indonesian Parliamentary Center* (IPC), *International NGO Forum on Indonesia Development* (INFID), Hivos, Kemitraan, *Indonesian Corruption Watch* (ICW), dan Medialink.

Keinginan pemerintah untuk melakukan reformasi keterbukaan secara menyeluruh dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan CSO dalam bentuk OGI dan juga RENAKSI, merupakan perwujudan dari konsep pemerintahan yang terbuka atau *open government* yang diungkapkan dalam bab 2 oleh Lathrop dan Luma (dalam Gant & Lee, 2011: 17), dimana pemerintah bekerja dan berinovasi dengan semua orang, terutama masyarakat dan mendorong transparansi diseluruh operasional kerjanya.

Demokrasi yang berjalan selaras dengan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi isu keterbukaan, dan pemerintah juga yang membuka kesempatan kolaborasi dengan CSO untuk reformasi keterbukaan, maka hal ini sejalan dengan pemikiran Gant dan Lee (2011: 17) tentang *open government* yaitu pemerintah yang tidak hanya menunjukkan transparansi tetapi juga kerja sama aktif dengan warga dalam proses pembuatan kebijakan.

Terkait dengan isu keterbukaan, dalam tahapan formulasi aksi ini, terutama pada tahap awal yaitu penjangkaran aspirasi masyarakat dalam RENAKSI 2016-2017 dan 'Solusimu'

pada RENAksi 2014-2015. Hal ini menunjukkan bahwa secara mekanisme selaras dengan yang makna keterbukaan yang diutarakan oleh Rosen (dalam OECD, 2003: 30) pada penjelasan dalam bab sebelumnya, dimana pemerintah mendengarkan opini publik dan mengambil opini-opini tersebut dan diupayakan untuk masuk dalam kebijakan sebagai pilihan dan bantuan yang dalam hal ini adalah ketika merumuskan RENAksi.

Tahapan penyusunan formulasi aksi menerapkan prinsip pemerintahan yang kolaboratif, yang melibatkan tidak hanya pemerintah, namun juga aktor-aktor diluar pemerintah termasuk didalamnya organisasi masyarakat sipil atau CSO, dan juga melibatkan seluas-luasnya lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyusun aksi-aksi yang mendorong keterbukaan dan transparansi.

#### *b. Implementasi Aksi*

Implementasi aksi tidak tertutup hanya untuk tim inti saja, melainkan juga terbuka bagi lembaga mana saja yang memang ingin mewujudkan keterbukaan tersebut.

Implementasi aksi merupakan proses kedua sebagai tahapan selanjutnya setelah formulasi aksi dimana dalam tahap ini aksi yang telah disusun akan direalisasikan ke dalam bentuk nyata, dimana aksi-aksi yang dibuat berdasarkan formulasi yang telah disusun, disepakati, dan dipublikasikan yang mengandung jawaban dan solusi atas permasalahan yang ditemukan dan harus dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait.

Rencana aksi yang telah disusun merupakan jawaban atas berbagai persoalan-persoalan sosial, khususnya permasalahan keterbukaan yang sudah dikumpulkan dari masyarakat pada tahap formulasi aksi, dimana implementasi dilakukan untuk menangani masalah-masalah sosial yang ada, menyampaikan gagasan keterbukaan melalui aksi-aksi dan melalui implementasi tersebut dapat memberi perubahan pada sektor keterbukaan dan transparansi di kalangan masyarakat, termasuk pemerintah.

Pada RENAksi periode 2014-2015 terdapat total 19 komitmen dengan 60 target capaian dalam rencana aksi yang sudah dijalankan. Diluar pihak kementerian yang ada di dalam tim inti, kementerian yang juga terlibat dan ikut melaksanakan RENAksi 2014-2015 beberapa diantaranya Kementerian

Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, dan bahkan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Berbeda dengan unsur pemerintah, unsur publik yang diwakilkan oleh organisasi masyarakat sipil atau CSO, membantu untuk melaksanakan program dalam RENAksi melewati pengawasan dan pemberian bantuan. Bantuan tersebut seperti tahapan-tahapan atas program yang telah disusun untuk membantu proses keterbukaan segera terwujud dalam institusi pemerintahan.

Jika dalam proses formulasi, CSO membantu menemukan masalah, memberikan data, membantu memberikan solusi dan jawaban atas hal-hal yang dapat menghambat keterbukaan dan transparansi di sektor pemerintah, namun dalam pengimplementasinya CSO membantu dalam langkah-langkah yang konkret untuk membantu sektor pemerintahan mewujudkan keterbukaan tersebut.

Terkait keterlibatan tim inti lainnya, seperti juga pada RENAksi 2014-2015 pada kelompok komitmen pertama "Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dalam Mendorong Transparansi, Partisipasi Publik, dan Pelayanan Publik", aksi keenam yaitu mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik. Dimana dalam aksi ini ada kolaborasi antara Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai penanggung jawab dan Ombudsman RI, sebagai instansi terkait.

Kolaborasi tersebut mendukung pernyataan tentang pemerintahan yang diutarakan oleh Moro (dalam OECD, 2003: 137) dan Satterthwaite (dalam United Nations, 2007: 225) bahwa konsep pemerintahan yang adalah sebuah pola dalam proses memerintah untuk menghasilkan kebijakan dalam sistem sosial-politik sebagai hasil dari berbagai aktor yang terlibat.

Implementasi rencana aksi juga melibatkan tidak hanya pemerintah dan CSO, tapi juga masyarakat secara langsung. Hampir sama dengan Kontes Solusimu, pada proses pengimplementasian RENAksi 2014-2015, masyarakat juga ikut berperan serta untuk mengimplementasikan dengan melakukan pengawasan seperti CSO. Wadah yang disediakan bagi masyarakat yaitu dengan

disediakan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat LAPOR.

Kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan masyarakat, khususnya juga tim inti pada pelaksanaan implementasi aksi yang saling mendukung, namun pada kenyataannya belum bisa memenuhi tingkat keterbukaan yang seharusnya. Jika dikatakan secara mekanisme, kolaborasi bahwa pemerintah yang melaksanakan dan CSO yang melaksanakan dengan memberi bantuan agar pemerintah dapat mencapai target aksi tersebut seperti pada penjelasan diatas, pada kenyataan kolaborasi tersebut belum sesuai.

Implementasi merupakan proses untuk aksi-aksi yang telah disusun untuk dijalankan. Secara mekanisme, implementasi rencana aksi tidak menutup kemungkinan untuk dijalankan oleh pihak manapun, namun dalam tahap pengimplementasiannya dapat terlihat adanya pembatas yang jelas antara unsur pemerintah dan unsur publik.

### *c. Evaluasi Aksi*

Secara garis besar dan internasional dalam inisiatif global OGP, rencana aksi yang dimandatkan pada setiap negara akan melalui proses evaluasi yang sama yaitu *Independent Review Mechanism* atau disingkat IRM. Di Indonesia terdapat tiga mekanisme pengevaluasian yang akan membantu untuk menilai pencapaian dari target-target setiap aksi dan menjadi pedoman untuk rencana aksi selanjutnya. Tiga mekanisme itu adalah IRM, GSAR atau *Government Self Assessment Report* dan Sistem Pemantauan Triwulan.

*Independent Review Mechanism* atau disingkat IRM merupakan sebuah dokumen yang dihasilkan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak independen langsung dari OGP. IRM sebagai sebuah lembaga independen tidak secara langsung bertanggung jawab kepada Komite OGP. IEP atau *International Experts Panel* yang menaungi IRM secara langsung. Anggota Panel Internasional terdiri dari panel ahli internasional yang terdiri dari para ahli di bidang transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan metode penelitian ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial (CRPG, n.d.:135).

Dokumen IRM menilai sejauh mana rencana aksi dan komitmennya dicerminkan di setiap negara dengan cara-cara yang spesifik untuk negara seperti nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, dan

disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi OGP. Penilaian ini dikerjakan dengan salah satunya yaitu mewawancarai, meminta data, dan mengkonfirmasi pihak-pihak berkepentingan sekaligus pihak terkait, khususnya juga OGI di Indonesia.

Evaluasi selanjutnya yaitu GSAR atau *Government Self Assessment Report* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh pemerintah itu sendiri, yang dalam hal ini disusun oleh pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Nasional OGI sebagai wadah, yang kemudian laporan yang disusun dalam GSAR juga akan dikonsultasikan kepada tim inti dari OGI baik itu unsur pemerintah maupun unsur publik.

Sistem evaluasi selanjutnya, yaitu Sistem Pemantauan Triwulan, yang juga merupakan sistem evaluasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung sekaligus membantu proses pencapaian aksi-aksi dalam rencana aksi. Sistem ini dilaksanakan setiap tiga bulan dan juga diwadahi oleh Sekretariat Nasional OGI.

Baik IRM, GSAR maupun Sistem Pemantau Triwulan merupakan sistem evaluasi yang diadaptasi oleh OGI. Ketiga sistem ini membantu untuk mendukung tercapainya target-target dalam rencana aksi. Setiap laporan evaluasi yang disusun akan membantu untuk menyusul laporan evaluasi selanjutnya dan bahkan sebagai patokan dalam menyusun rencana aksi di tahun selanjutnya.

Tahap evaluasi merupakan tahap yang memastikan bahwa aksi-aksi yang telah disusun dijalankan, dan berjalan sesuai jalurnya. Sebagai tahap ketiga dari keseluruhan rangkaian rencana aksi juga memberikan rekomendasi dan menggambarkan adanya kolaborasi. Kolaborasi tersebut dikaitkan dengan proses dari evaluasi itu sendiri, baik IRM, GSAR, dan Sistem Pemantau Triwulan.

Proses evaluasi yang melibatkan banyak pihak sebagai bentuk dari pemerintahan yang berkesinambungan, saling mendukung, karena tidak hanya tim inti saja, melainkan juga melibatkan institusi pemerintah lainnya, CSO di luar tim inti, individu dan aktivis, menunjukkan bahwa kemitraan juga hadir dalam proses evaluasi untuk semakin mendukung adanya keterbukaan di berbagai sektor.

#### *d. Kemitraan Global*

Pemikiran demokrasi dan liberalis memberikan gambaran bahwa kemitraan OGP hadir untuk menjawab desakan masyarakat mengenai isu keterbukaan, ketika negara hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang disuarakan.

Tujuan OGP merupakan tujuan global atas permasalahan global yaitu ketidakterbukaan pemerintah yang dihadapi, dan jika ditinjau lebih lanjut setiap negara yang berkomitmen untuk gerakan ini, termasuk didalamnya pemerintah daerah dan masyarakat yang diwakili oleh organisasi masyarakat sipil yang mewujudkan konsep dari liberalisme itu sendiri.

Memungkinkan untuk adanya kerjasama antara pemerintah dan pemerintahan, yang meliputi aktor nonnegara yaitu organisasi masyarakat sipil untuk mencapai *value* setiap insititusi yang terlibat dan *value* yang lebih besar untuk kepentingan bersama. Tujuan pemerintah Indonesia untuk reformasi keterbukaan secara menyeluruh dan tujuan organisasi masyarakat sipil sebagai perpanjangan-tanganan dari keinginan masyarakat.

#### **Kesimpulan**

*Open Government Partnership* lahir sebagai sebuah gerakan global yang diinisiasi oleh delapan negara pencetus termasuk Indonesia yang terfokus pada isu keterbukaan untuk mendorong pemerintah yang lebih transparan, terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. OGP merupakan cerminan dari konsep liberalisme, karena melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan individu, seperti aktivis dan ahli-ahli tertentu dari berbagai negara di dunia, yang bermitra untuk mendorong transparansi di sektor pemerintahan.

OGI sendiri merupakan bagian dari OGP dan sebagai salah satu negara pencetus, Indonesia menjawab tantangan dunia terkait isu transparansi dan keterbukaan yang juga diinginkan oleh masyarakat Indonesia. OGI hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan inisiatif tersebut dalam bentuk Rencana Aksi Nasional yang harus dilaksanakan sebagai sebuah mandat global dan diimplementasikan ke instansi-instansi terkait.

Rencana aksi di Indonesia terpaparkan dalam tiga proses utama, yaitu formulasi,

implementasi dan evaluasi. Proses formulasi merupakan proses awal penyusunan rencana aksi dengan menghasilkan aksi-aksi yang menjawab masalah sosial yang telah dikumpulkan dari masyarakat, proses ini juga menunjukkan keterlibatan dari berbagai institusi yang terlibat baik pemerintah maupun perwakilan masyarakat sipil.

Tahap implementasi sebagai tahap pengoperasionalan aksi yang telah disusun pada tahap formulasi. Melalui tahap ini, keterbukaan diimplementasikan ke institusi-institusi pemerintah yang nantinya diharapkan dapat memberi efek reformasi birokrasi secara menyeluruh, dan keterbukaan dapat diterima oleh seluruh lapisan badan pemerintahan dan masyarakat.

Pada tahap evaluasi, yang melibatkan lembaga independen internasional atau IRM dan juga melibatkan lembaga di dalam sistem pengevaluasian di Indonesia yaitu sistem GSAR. Hasil evaluasi RENAksi 2014-2015, dapat dikatakan pada tahap formulasi sudah dikatakan cukup optimal dengan mengembangkan prinsip partisipasi dari masyarakat. Hasil berikutnya pada tahap implementasi masih belum optimal, karena pihak institusi yang terlibat dalam implementasi aksi masih tidak transparan dan tidak dijelaskan secara merinci, baik itu dalam laporan triwulan maupun GSAR.

Kemitraan hadir dalam gerakan *open government* di Indonesia, karena dari proses formulasi hingga evaluasi, inisiasi ini melibatkan tidak hanya institusi pemerintah, namun juga melibatkan lembaga non-pemerintah, yaitu organisasi masyarakat sipil dan lembaga independen.

#### **Daftar Pustaka**

- Gant, J. and Lee, N.T. (2011). *Government Transparency: Six Strategies for More Open and Participatory Government*. Washington DC: The Aspen Institute.
- Jackson, R. and Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations Theories and Approach*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia
- Centre of Regulation Policy and Governance. [n.d.]. *Mekanisme Pelaporan Independen (IRM) Laporan Perkembangan: Indonesia 2014-15*. Diperoleh dari

- [https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indo\\_ProgressReport3\\_PubCommBahasa.pdf](https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Indo_ProgressReport3_PubCommBahasa.pdf)
- Organization For Economic Co-operation and Development. (2003). *Open Government For Economic Cooperation: Fostering Dialogue with Civil Society*. France.
- United Nations. (2006). *Public Administration and Democratic Governance: Government Serving Citizens*. United States of America: United Nations.
- Open Government Partnership. [n.d.]. What is The Open Government Partnership?. Diperoleh dari <http://www.opengovpartnership.org/about>
- Open Government Partnership. [n.d.]. Independent Reporting Mechanism. Diperoleh dari <https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism>
- Open Government Partnership. [n.d.]. About The IRM. Diperoleh dari <https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism/about-irm>
- Open Government Partnership. [n.d.]. Executive Summary of OGP IRM Technical Paper 1. Open Government Partnership (OGP) by The Numbers: What The IRM Data Tells Us About OGP Results. Diperoleh dari [http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/Technical%20paper%201\\_Executive%20summary\\_final.pdf](http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/Technical%20paper%201_Executive%20summary_final.pdf)
- Open Government Partnership. [n.d.]. Guidance for National OGP Dialogue. Diperoleh dari [http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP\\_consultation%20FINAL.pdf](http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/attachments/OGP_consultation%20FINAL.pdf)
- Open Government Partnership. [n.d.]. About the IEP. Diperoleh dari <https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism/about-iep>
- Open Government Indonesia. [n.d.]. Bagaimana OGI Bekerja. Diperoleh dari <http://opengovindonesia.org/front/ogiwork#about4>
- Open Government Indonesia. [n.d.]. Siapa saja Tim Inti OGI?. Diperoleh dari <http://opengovindonesia.org/front/ogiwork>
- Open Government Indonesia. [n.d.]. Open Government Partnership. Diperoleh dari <http://opengovindonesia.org/front/ogiwork#about6>
- Open Government Indonesia. [n.d.]. Rencana Aksi OGI. Diperoleh dari <http://opengovindonesia.org/front/introrenaksi>
- Open Government Indonesia. [n.d.]. Renaksi Final OGI 2014. Diperoleh dari <http://opengovindonesia.org/front/detail/info/renaksi-final-ogi-2014>
- Open Government Indonesia. [n.d.]. Rencana Aksi OGI 2014-2015. Diperoleh dari <http://opengovindonesia.org/front/renaksipoint/135/2014-2015>.
- Organization For Economic Co-operation and Development. (2016). OECD Kajian Open Government Indonesia. Diperoleh dari <https://www.oecd.org/gov/open-gov-review-indonesia-kajian.pdf>
- Soleh, A. [n.d.]. Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli. Diperoleh dari [https://www.academia.edu/6462730/Pengertian\\_Demokrasi\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](https://www.academia.edu/6462730/Pengertian_Demokrasi_Menurut_Para_Ahli)
- Transparency International. [n.d.]. Corruption Perception Index 2015. Diperoleh dari <https://www.transparency.org/cpi2015/#results-table>
- Transparency International Indonesia. (2016, 27 Januari). Corruption Perception Index 2015: Perbaiki Penegakan Hukum, Perkuat KPK, Benahi Layanan Publik. Diperoleh dari <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2016/01/27/corruption-perceptions-index-2015>
- United Nations. (2015). Secretary-General, in Message for International Anti-Corruption Day, Notes 'Dramatic' Change in Global Attitudes Towards Graft. Diperoleh dari <https://www.un.org/press/en/2015/sgsm17399.doc.htm>.
- Yunianto, T. (2019). Masa Depan Jaringan 5G dan Perilaku Komunikasi Digital. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*. Vol 2(1): 1-7.